

Sosialisasi Paket Peraturan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, dan Bukittinggi
Oktober s.d. November 2008

Sesi Tanya Jawab

1. Yusron - Kanwil Bandung.
 - a. Mata anggaran belanja gaji, apakah pengembalian belanja gaji harus netto atau bruto?
 - b. apakah akan mengembalikan sisa pagu?
 - c. Surat setoran, blanko pajak banyak dijual sedang untuk SSBP dan SSPB tidak. Dimana kita dapatkan supaya ada keseragaman format SSBP dan SSPB?

Jawaban:

- a. Seharusnya pengembalian gaji yang benar adalah bruto, karena Gaji sudah diperhitungkan dengan PFK, namun prosesnya akan lebih panjang/rumit karena harus ada proses pengembalian atas potongan PFK yang belum ada sistemnya. Sehingga untuk sementara dikembalikan saja secara netto.
 - b. Bukan kewenangan dari akuntansi untuk mengatur itu. Pengembalian belanja memang seharusnya akan mengembalikan pagu, namun tidak otomatis mengembalikan pagu karena fokusnya lebih kepada sistem penganggaran dan perbendaharaan.
 - c. Contoh Formulir SSBP dan SSPB ada pada lampiran Perdirjen No.78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui MPN. Dijual dimana? Bukan domain dari akuntansi untuk melakukan pengadaan formulir.
2. Rudi – BKF
 - a. Mengenai hibah, bagaimana realisasi dari hibah itu, dokumen apa saja yang digunakan untuk melakukan realisasi hibah. BKF mendapat hibah 250M tetapi masih diblok/dibintangi oleh DJA.
 - b. Penjelasan mengenai revisi, mekanismenya bagaimana karena batasannya sampai 31 oktober.
 - c. Terkait revisi, DJA punya layanan unggulan yaitu pada saat revisi bisa 5 hari sedangkan DJPBN sampai kapan?

Jawaban :

- a. Samakan dulu arti dari kata HIBAH, ada belanja hibah dan belanja yang dibiayai dari hibah. Sumber dana dari Rupiah Murni, pinjaman luar negeri (utang), belanja yang dibiayai dari hibah, dan belanja yang dibiayai dari PNPB (BLU). Masalahnya banyak KNL tidak melakukan pengesahan hibah dalam DIPA masing-masing KNL (off budget). Saat ini sedang dilakukan hearing dengan DJPU dan peraturan yang ada, dokumen sumber untuk realisasi: pagu (on budget) NOD, untuk belanja ke daerah yaitu SPM/SP2D, untuk penerimaan hibah yang langsung diterima KNL

yaitu SPM pengesahan, SPM hibah untuk belanja hibah itu sendiri. (perdirjen 67).

- b. Revisi DJA kemungkinan sulit karena ada 2 hal terkait. Hibah dibintang karena yang mengetahui hibah itu sudah efektif adalah DJPU. Selama belum ada register hibah dari DJPU, maka DIPA akan terus dibintang oleh DJA. Kita harap di tahun depan tidak ada lagi revisi.
 - c. Sesuai Pasal 13 ayat (3) PMK No.46/PMK.02/2008 Batas waktu pengesahan Revisi DIPA paling lama 5 hari kerja setelah usulan pengesahan revisi serta data pendukung diterima secara lengkap.
3. Bea Cukai
- a. Rekonsiliasi mengenai pendapatan bea cukai yang menganut cash basis, seperti setoran bea masuk. Bea Cukai mencatat sebagai penerimaan bea cukai setelah kewajiban kepabeannya terpenuhi. Bagaimana solusinya?
 - b. Jaminan yang dikelola oleh bendahara penerimaan berupa tunai, garansi dll. Bagaimana pencatatannya, karena itu seperti accrual.

Jawaban :

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia menganut *Cash Toward Accrual*. Untuk akun-akun Ralisasi Anggaran seperti Pendapatan bea cukai menganut prinsip *cash basis* sehingga pendapatan bea cukai dicatat pada saat diterima di rekening Kas Negara, bukan pada saat kewajiban kepabeannya terpenuhi. Hal ini jelas akan menyebabkan ketidakcocokan dalam proses rekonsiliasi pendapatan antara Bea Cukai dan KPPN. Bea Cukai harus mengacu pada pendapatan yang benar-benar sudah diterima di kas negara untuk diakui sebagai pendapatan bea cukai.
- b. Jaminan hanya dicatat/diungkapkan dalam CaLK. Belum secara utuh dibukukan di dalam neraca dengan perkiraan (akun) tersendiri. Dibuatkan penjelasan di CaLK bahwa kenapa masih ada sisa kas di akhir tahun.

4. Mukti - DJP

Ada permasalahan 547111 tentang SPM IB pajak, belum tertera kode fungsi, sub fungsi dan kegiatan. Masalah pada saat akhir tahun yaitu saat rekonsiliasi timbul perbedaan yang besar (tgkat eselon 1). Bagaimana solusinya spy bs meminimalisasinya.

Jawaban :

Hal tersebut merupakan kewenangan DJP. PMKnya pun saat ini sedang disiapkan oleh DJP. Konsep awalnya untuk SPM IB ada Fungsi, Sub Fungsi dan Program tetapi saat peraturannya keluar tidak ada lagi.

Setiap KPP harus menginput SPM IB jd bedanya drmn? Kemungkinan besar KPP tersebut tidak mencatat SPM IB dalam SAI.

Ke depannya sesuai surat Direktur APK tanggal 21 Nopember 2008 Nomor S-675/PB.7/2008, agar diisi dengan Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kode Satker KPP di mana WP yang bersangkutan mendapatkan imbalan bunga tersebut.

5. Setyo – Itjen

- a. Reviu yang dilakukan oleh itjen menurut slide setelah jurnal entry dan posting. Apakah ini yang dinamakan reviu. Padahal tidak semudah itu.
- b. Dalam pelaksanaan reviu ada pemahamn di tngkat bawah yaitu account piutang. Sampai sejauh mana reviu dilakukan?
- c. Reviu atas pengenaan PPh migas tidak sesuai dengan seharusnya, karena penerimaan migas diakui pada saat diterima di RKUN di BI bukan pada saat mendapatkan nomor NTPN.

Jawaban :

- a. Setiap satuan kerja pada setiap triwulan harus menyampaikan laporan keuangan kepada itjen untuk reviu. Proses jurnal dan posting tidak dilakukan secara manual, namun menggunakan aplikasi SAI. Aplikasi yang disiapkan sangat *user friendly* dan mudah digunakan. Hanya memang untuk jurnal penyesuaian harus dilakukan penjurnalan secara manual, hal itu pun mudah dilakukan, hanya tinggal pilih salah satu akun yang dimaksud.
- b. Hasil reviu diharapkn menjadi parameter selanjutnya untuk melakukan perbaikan, dan kalau tidak bisa juga bisa dilakukan asistensi oleh itjen kepada satker-satker tertentu. Tata cara reviu dan formulir yang digunakan telah diatur di dalam Perdirjen No.44/PB/2006 tentang Pedoman pelaksanaan Reviu LKK/L.
- c. Saat ini sedang dilakukan kajian untuk dibuatkan pengaturan oleh Dit. PKN agar pendapatan negara yang diterima langsung ke RKUN di BI juga melalui mekanisme MPN.

6. Sarmijan - KPPN1

- a. Banyak ditemui kesalahan mengenai ralat setoran SSPB atau SSBP
- b. Kode penerimaan tertentu tidak bs diterima di bank tertentu sehingga satker kesulitan pada saat penyetoran.
- c. Kode satker tidak ada, siapa yang akan memberikan kode tersebut?

Jawaban :

- a. Atas dasar permintaan ralat tersebut baik pihak satker maupun KPPN melakukan koreksi pembukuan sebagaimana diatur dalam Perdirjen No.Per-69/PB/2006 tentang Pedoman koreksi Kesalahan Laporan Keuangan.
- b. SSPB wajib hukumnya harus mengisi kode satker. SSP tidak wajib mengisi kode satker tapi wajib mengisi kode NPWP. Kita sudah memberikan validasinya. Aplikasi MPN bukan DJPBN yang buat tetapi bank-bank yang buat sendiri, kita hanya

menyediakan databasenya. Penolakan oleh Perbankan disebabkan ada beberapa Bank yang belum mengupdate database yang telah diperbaharui oleh DJPBN.

c. Kode satker ditetapkan oleh Ditjen Anggaran.

7. a. Persediaan masuk kode akun mana 52 atau 53?
b. Honor pengadaan persediaan masuk mana?

Jawaban:

- a. Pengadaan Barang Persediaan keluar dari Belanja Barang (52). Pencatatan persediaan berbeda dengan aset tetap yang menggunakan Metode Perpetual. Persediaan dicatat dengan Metode Periodikal. Persediaan tersebut harus tetap dimaintain dalam rangka *managerial report*. Ada honor pengadaan aset tetap keluar dari mata anggaran 53XXXX yang sifat pembayarannya adh LS (langsung). Perdirjen 66 tentang Tata Cara Pencairan Dana APBN belum mengakomodir hal tersebut. Perdirjen 66nya harus segera diperbaiki/direvisi.
- b. Seharusnya honor pengadaan persediaan akan menambah nilai persediaan sesuai dengan konsep nilai perolehandan bila dapat diatribusikan secara langsung kepada nilai persediaannya. Namun demikian bila biaya honor tersebut tidak bisa diatribusikan secara langsung terutama untuk pengadaan yang itemnya banyak dan lebih besar *effort* yang dikeluarkan daripada manfaat yang didapatkan, maka kita tidak perlu memasukkannya sebagai penambahan nilai persediaan, tetapi dicatat sebagai biaya tersendiri (belanja barang) selama hal tersebut telah tercantum dalam RKAKLnya.

8. Budi Tasmawida – Kanwil Banjarmasin

Ada beberapa akun khususnya akun Kiriman Uang, pembukuan pengeluaran dan penerimaannya menyimpang dari kebiasaan. Misalnya pengeluaran dibukukan dengan 824123, sedangkan penerimaannya dibukukan dengan 814126. Contoh lain misalnya 824122 dengan 814125. Masih ada beberapa lagi akun yang tidak sama.

Pertanyaan: Apakah pendapat kami ini betul?

Jawaban:

Memang masih ada beberapa kodefikasi akun pada Bagan Akun Standar yang tidak konsisten. Saat ini sedang dibuatkan Draft Perdirjen tentang Penambahan, Penyesuaian, Perubahan Penjelasan dan Perbaikan Kodefikasi Akun yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.

9. Edwin D Sunjaya – Kanwil IX DJPBN Pangkalpinang

- a. Pada PMK 171/PMK.05/2007, salah satu pasalnya menyatakan bahwa, DJKN harus melaksanakan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN. Bagaimana prosedur rekonnnya? Apakah dari sisi neraca

(nominal aset tetap)? Bila terjadi selisih, penelusuran data sumbernya bagaimana?

- b. Mengenai aplikasi koordinator wilayah DK/TP sampai sekarang kami belum mendapatkan petunjuk teknisnya. Bagaimana pelaksanaannya di daerah?

Jawaban:

- a. Draft Petunjuk teknis tentang rekonsiliasi DJKN dengan DJPBN sedang dalam tahap finalisasi.
- b. Koordinator wilayah Dekon/TP ditunjuk oleh Dinas Wilayahnya yang ditunjuk/ditentukan oleh Gubernur/Kepala Daerah.

10. Saripudin – KPPN Jakarta II.

- a. Ada beberapa akun yang tidak memiliki batasan pengertian sehingga menimbulkan banyak penaksiran atas akun2 tersebut. Contoh: Belanja Jasa Lainnya, Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), etc.
- b. Penentuan pemeliharaan dikapitalisasi atau tidak, dengan kenyataan dokumen pendukung SPM berupa SPTB maupun resume kontrak tidak memberikan informasi apakah terjadi penambahan masa manfaat dan lain-lain, tentunya akan menyulitkan petugas front office di perbendaharaan. Untuk melakukan evaluasi maupun penentuan akan dibebankan ke akun yang sebenarnya terjadi?
- c. Rincian dan penjelasan yang lebih rinci atas akun Honor Tetap dan Honor Tidak Tetap.
- d. Konsistensi penggunaan akun sehingga menghasilkan laporan akuntansi yang bisa dibandingkan. Contoh: biaya konsinyering meliputi sewa ruang, catering, akomodasi hotel. Apabila penagihannya dilakukan terpisah, maka akun yang digunakan, disesuaikan dengan jenis belanjanya (sewa ruangan dibebankan ke belanja sewa). Namun apabila biaya konsinyering dilakukan melalui paket organisasi, tentunya akun yang digunakan tidak dapat dipecahkan karena bersifat paket.
- e. Ada satker PU, SNVT Pengadaan Lahan membebankan seluruh belanja baik pembelian ATK yang digunakan ke belanja modal melalui mekanisme UP (ada dispensi). Apakah tepat apabila seluruh biaya administrasi proyek pengadaan dibebankan ke belanja modal?

Jawaban :

- a. Secara umum, pada prinsipnya kode akun 521119 digunakan untuk menampung pengeluaran belanja barang operasional yang tidak bisa ditampung pada akun 521111, 521112, 521113, 521114. Demikian juga akun 521219 digunakan untuk menampung pengeluaran belanja barang non operasional yang tidak bisa ditampung pada akun 521211 dan 521212. Juga berlaku untuk akun 522119 digunakan untuk menampung pengeluaran belanja jasa yang tidak bisa ditampung pada akun

522111, 522112, 522113, 522114 dan 522115. Hal ini menyebabkan akun tersebut bisa dipakai untuk banyak hal (sebagai keranjang sampah).

- b. Petugas *front office* hanya melakukan pengujian sebatas dokumen SPM, SPTB, dan resume kontrak. Bila pada dokumen tersebut tidak memberikan informasi tentang kriteria pemeliharaan yang dikapitalisasi, dan dibebankan pada belanja barang, maka bukan tanggung jawab KPPN apabila SPM tersebut seharusnya dibebankan ke belanja modal terbit SP2Dnya.
- c. Penjelasan honor tetap dan honor tidak tetap sudah cukup jelas terakomodasi dalam Bagan Akun Standar. Mengenai honor tidak tetap mulai tahun 2009 dibebankan kepada Belanja Barang (52) bukan Belanja Pegawai (51).
- d. Umumnya biaya pelaksanaan kegiatan seperti konsinyering sudah termasuk di dalam satu paket sehingga bisa digabung di dalam satu akun, umumnya 521219, kecuali untuk biaya perjalanan dinasnya.
- e. Pada prinsipnya, sesuai dengan prinsip harga perolehan, semua jenis pengeluaran sampai dengan aset tetap tersebut (dalam hal ini lahan) bisa digunakan merupakan belanja modal. Namun demikian untuk biaya administrasi proyek (pembelian ATK dan supplies kantor) agar dibebankan kepada belanja barang non operasional lainnya.

11. Wiwin – Bapepam LK

Bapepam dan LK mempunyai kebijakan tentang piutang PNBPN khususnya yang berasal dari denda di bidang pasar modal: apabila jangka waktu yang diberikan untuk melunasi piutang telah melewati 74 hari maka piutang dikategorikan sebagai piutang macet yang pengurusannya dilimpahkan ke DJKN.

Pertanyaan: apakah kebijakan internal ini dapat dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan sebagai piutang tidak lancar mengingat tenggang waktu 74 hari dikategorikan sebagai piutang macet?

Jawaban:

Atas dasar kebijakan internal Bapepam tersebut, bila telah melewati 74 hari maka piutang PNBPN tersebut seharusnya direklasifikasi menjadi Aset Lainnya-Piutang Jangka Panjang. Namun demikian sistem akuntansi dan akun yang ada dalam BAS belum mengakomodasi. Hal ini akan menjadi masukan untuk perbaikan Perdirjen No.Per-02/PB/2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBPN dan PMK 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

12. Elyas – KPPN Jakarta II

Transaksi Pemindahbukuan Intern KPPN. Tanggal nota debet pelimpahan PBB/BPHTB dari Bank Persepsi tidak sama dengan tanggal Nota Kredit dari BO III. Akibatnya pemindahbukuan intern

KPPN menjadi selisih. Sedangkan KPPN dalam menyajikan laporan berasal dari dokumen sumber, yaitu nota debit, nota kredit, rekening koran. Apa yang harus dilakukan oleh KPPN.

Jawaban:

Hal tersebut dapat dijelaskan pada daftar selisih.

13. KPPN Pangkal Pinang

- a. MA 423221 masuk ke BA masing-masing departemen atau lainnya.
- b. Potongan pensiun lebih tepat diperlakukan sebagai BKPP 5131 atau merupakan pengembalian belanja gaji (potongan tersebut di antaranya karena lebih bayar saat aktif PNS).
- c. Bagaimana proses rekonsiliasi untuk penggabungan 2 satker menjadi 1 satker. Dimana masing-masing satker sebelumnya berada pada KPPN yang berbeda. Misalnya: satker A wilayah bayar KPPN Pangkalpinang dan satker B wilayah bayar KPPN Tanjungpandan dan digabungkan menjadi satker C pada wilayah bayar KPPN Pangkal Pinang dimana sebelum penggabungan masing-masing satker terjadi realisasi penerimaan dan pengeluaran. Bagaimana proses rekon penerimaan dan pengeluaran.
- d. Penggunaan akun belanja 521119 dan 521219 apakah dapat menampung akun yang sudah ditetapkan di dalam penggunaannya, misal akun 521114 di dalam penggunaan semestinya tapi dimasukkan dalam akun 521119.
- e. Pengertian crash program pada akun 521219.
- f. Honor jasa profesi (522x) dimasukkan dalam honor tim (512x) juga upah tenaga kerja padat karya pada DISNAKERTRAN masuk akun 512112 atau 521219.
- g. Penambahan daya listrik akun 52 atau 53.

Jawaban :

- a. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (423221) menggunakan BA masing-masing Departemen/Lembaga.
- b. Bila potongan tersebut merupakan pengembalian belanja pegawai saat yang bersangkutan masih aktif sebagai PNS dan masih dalam tahun anggaran berjalan, maka akun untuk pengembalian belanja tersebut adalah kelompok 5111. Sedangkan bila potongan tersebut adalah untuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu maka akunnya adalah 423911 (Pendapatan Lain-Lain: Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL)
- c. Saat ini Draft perdirjen tentang satker-satker yang dilikuidasi dan merger sedang dalam tahap finalisasi (*trigger* dari kasus penggabungan kantor vertikal DJP menjadi KPP Pratama dan Balai Karantina Pertanian).
- d. Tidak bisa.
- e. Kegiatan bersifat insidental dan tidak terus menerus.

- f. Honor jasa profesi tidak bisa dikategorikan sebagai honor tim karena tarifnya yang berbeda sesuai dengan SBU. Sedangkan upah tenaga kerja yang bukan PNS tidak dapat dikategorikan sebagai belanja pegawai melainkan belanja barang (bisa ke 521219 selama kegiatan tersebut bukan operasional sehari-hari satker tersebut).
 - g. Penambahan daya listrik akan menambah kapasitas daya listrik misalnya dari 2.200W menjadi 3.600W dan selama memenuhi nilai minimum kapitalisasi dikeluarkan dari Belanja Modal (53). Pengalokasiannya tergantung pada saat pengadaan awalnya dahulu. Bila masuk ke dalam pengadaan gedung dan bangunan (53311X) maka dialokasikan dari 53511X.
14. Tika Danti – KPPN Bandar Lampung
- a. Sejauh mana BAS akan menjadi pedoman kita dalam arti penggunaan MAK yang dijelaskan dan dirinci dalam Bagian C penjelasan akun itu harus benar-benar kita ikuti karena pada prakteknya seringkali terjadi bahwa kegiatan dan sub kegiatan telah mendukung tapi ternyata MAK yang ada terbatas yang seringkali untuk revisi tidak memungkinkan.
 - b. Minta sarannya jika di masa yang akan datang terdapat hambatan contohnya masih terdapat satker yang kode MAKnya tidak sesuai dengan BAS dan susah untuk revisi atau mereka tidak bersedia merevisi, padahal kegiatan sub kegiatan telah mendukung apakah dana tersebut tetap tidak akan bisa dicairkan?
 - c. Kritik. Mengapa baru sekarang diadakan sosialisasi PMK 91 tentang BAS ini kepada seksi perbendaharaan padahal perbendaharaan merupakan saringan pertama atas pelaksanaan. BAS yang menentukan benar tidaknya transaksi realisasi anggaran.
 - d. Dalam PMK 91 belanja buku masuk dalam MAK 5361, seringkali satker kecil seperti MAN, MIN, MTS memerlukan belanja buku untuk perpustakaan namun mereka hanya punya MAK 5211 dengan kegiatan sub kegiatan mendukung. Apakah belanja tersebut bisa direalisasikan dengan MAK 5211 atau harus revisi?

Jawaban :

- a. Pertanyaan poin a. hanya Statemen dari peserta, tidak perlu jawaban.
- b. Kasus tersebut, telah terjadi pada TA 2008. Revisi terakhir direncanakan pada tanggal 31 Oktober, maka terhadap satker yang belum merevisi DIPA/tidak mau merevisi, maka tanggung jawab ada di satker tersebut (KPA). Untuk mengatasi kejadian-kejadian tersebut telah terbit Perdirjen Nomor Per-50/PB/2008 tentang Pencairan Dana atas Reklasifikasi Belanja Barang dan Belanja Modal Pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2008.

- c. Pendapat KPPN Bandar Lampung benar. Kami terlambat mengadakan sosialisasi untuk Seksi Perbendaharaan dan Bendum.
- d. Untuk mengatasi hal tersebut, tujuan dari pengadaan buku tersebut jangan untuk perpustakaan tetapi untuk operasional kantor → 5211

15 Sugeng - DJKN

- a. Terdapat Perbedaan Istilah antara PMK nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dengan PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

PMK 171/PMK.05/2007	PMK 120/PMK.06/2007
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang	Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang
Unit Akuntansi Pengguna Barang	Unit Penatausahaan Pengguna Barang

Manakah istilah yang paling tepat digunakan oleh satuan kerja (pengguna barang) agar tidak membingungkan.

- b. Terkait dengan hasil kegiatan Kementerian Negara/Lembaga yang akan dijadikan PBMN, apakah bisa dibebankan anggarannya selain Belanja Modal, karena kalau masih dalam Belanja Modal berarti tercatat sebagai aset Kementerian Negara/Lembaga. Padahal aset tersebut, akan diserahkan kepada BUMN dalam bentuk PMN berarti harus melalui mekanisme penghapusan dahulu.

Jawaban:

- a. Mengenai perbedaan nomenklatur tidak usah dipertentangkan. Nomenklatur yang digunakan dalam PMK 171 untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (laporan keuangan) sedangkan nomenklatur yang digunakan oleh PMK 120 untuk menghasilkan laporan manajerial (LBMN)
- b. PMN dialokasikan melalui pengeluaran pembiayaan (724111) dan akan menghasilkan investasi non permanen pada neraca pemerintah.

16 Pak Sutarmin KPPN Lahat

- a. Mohon Penjelasan Korelasi antara Vera dan Perbendaharaan. Ada satuan kerja melaporkan kesalahan MAK dalam SPM, sehingga menjelaskan laporan vera harus diralat, sedangkan di Perbendaharaan MAK mencakup hanya 4 Digit (mis 5211), sedangkan vera itu 6 digit (mis 521114).
- b. Di Bank SSPB harus dibuat per MAK, sedangkan kalau terjadi utang belanja pegawai itu banyak MAK (a.l. Gaji Pokok, Tunjangan anak, tunjangan istri dan lain-lain). Bila SSPB dijadikan satu mak maka pihak Bank tidak bisa memprosesnya. Mohon penjelasannya cara penyelesaiannya yang simple.

Jawaban:

- a. Vera berfungsi sebagai back office, perbendaharaan sebagai front office. Apabila ada kesalahan elemen SPM maka seksi perbendaharaan belum memverifikasi SPM tersebut sesuai dengan amanat UU no 1 pasal 19. Untuk mengatasi hal tersebut, SPM harus diperbaiki, dan disampaikan ke satker (KPA) supaya tidak ada perbedaan saat melakukan rekonsiliasi.
- b. Disesuaikan dengan BAS yang digunakan dalam pembuatan SPM

17 Sarmijan - KPPN Jakarta I

- a. Bagaimana untuk meminimalisir permintaan ralat MAP dari satuan kerja terkait dengan penerimaan pengembalian belanja (SSPB) maupun SSBP karena setiap permintaan ralat MAP akan mempengaruhi laporan kas posisi (LKP) di KPPN.
- b. Terkait dengan penambahan akun dan kode satuan kerja pada MPN. Bagaimana prosedurnya dan siapa yang harus mengupdate aplikasi Bank Persepsi.

Jawaban:

- a. Ralat mata anggaran untuk pengembalian belanja harus dianalisa dahulu transaksinya apakah transaksi yang dimaksud sesuai dengan tujuan. Apabila memang harus diralat, maka ralat tersebut harus dilakukan oleh seksi yang berkompeten yaitu dalam hal ini seksi vera. Dipastikan ralat dimaksud telah sesuai, jangan sampai menyebabkan kesalahan kembali.
- b. Yang mengupdate aplikasi bank adalah bank pusat atas permintaan DSP (tim MPN).

18. Khuzaeni - KPPN Jakarta 3

Pembelian pengadaan kendaraan bermotor apakah masuk belanja modal/barang karena oleh satuan kerja direalisasikan pada belanja barang untuk pemeliharaan. (Di DIPA & POK) memang disediakan mohon penjelasan, terima kasih

Jawaban :

Bila kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk operasional sehari-hari perkantoran maka termasuk belanja modal peralatan dan mesin.

19. Anang - Dit PA

Anggaran

Sesuai PMK 46 tentang Revisi dinyatakan bahwa revisi tidak boleh mengakibatkan pagu minus, bagaiman caranya DJA mengatasi hal itu? karena untuk APBN-P sampai sekarang terdapat pagu minus yang belum terselesaikan.

Sampai sekarang ada perencanaan anggaran yang tidak jelas penggunaannya contohnya untuk pemeliharaan gedung dan

kendaraan dinas. Hal ini mengakibatkan banyak realisasi yang tidak sesuai dengan BAS. Bagaimana mengatasi hal tersebut ?.

Jawab :

Revisi yang mengakibatkan saldo minus terjadi karena pada saat satker mengajukan revisi tidak diperoleh informasi berapa realisasi yang dilakukan. Selama proses revisi satker disarankan tidak mengajukan SPM.

Apabila pagu minus terjadi, tanggung jawab terhadap hal tersebut bukan semata-mata di level PA tetapi satkerlah yang harus mempertanggungjawabkan lewat laporan keuangan.

20. Staf Dit. PA :

Pada perdirjen 66 pembayaran UP dan LS telah sesuai dengan maksud dan tujuan adapun untuk belanja modal (untuk biaya penunjangnya seperti untuk ATK, perjalanan dinas dapat dimintakan dengan pembayaran UP dengan cara mengakibatkan dispensasi ke Dit PA (bukan pernyataan KPA).

Jawaban:

Mekanisme pembayaran yang tertera dalam Perdirjen 66 harus disesuaikan dengan BAS. Perolehan aset tetap menurut SAP adalah seluruh pengeluaran yang membentuk aset tetap sampai siap digunakan seperti : honor, perjalanan dinas, training, dan lain-lain. Oleh sebab itu, ada honor, perjalanan dinas, training yang memakai mata anggaran 53xxxx. Hal ini akan diakomodasi dalam perdirjen 66.

21. NUR FRIDA IRFIANI - KPPN BANDAR LAMPUNG

Sosialisasi BAS pada Bank Persepsi seringkali hanya beberapa bank yang bisa menerima kode mak/map tertentu, tapi sering terjadi juga dalam satu bank pada hari ini bisa menerima mak tersebut, lain hari tidak bisa, mengapa terjadi? masyarakat sering dirugikan/dipersulit dalam penyetoran SSBP akhirnya solusi yang kami ambil adalah MAKMAP di Bank asal tembak lalu diperbaiki mak/mapnya di KPPN apakah hal ini tersebut berpengaruh ke data MPN pusat.

Setoran jasa giro, karena yang membuat SSBP adalah bank persepsi, seringkali tidak jelas kode satkernya sebenarnya setoran tersebut milik siapa dan harus diarahkan kemana? Kode satker ybs atau kode satker DJPB.

Pada aplikasi bendum terdapat MAK 573111 dan 573119. Namum di aplikasi verak yang tercover hanya MAK 573119. Sebenarnya keduanya mempunyai uraian yang sama, mana diantara keduanya yang masih eksis? Hal tersebut menyulitkan pelaporan

MAP untuk pengembalian BOS menggunakan MAP apa? Bagaimana dg kode satkernya? Karena terkadang yang menyetor bukan bendahara ybs dan bila kita asal tembak kode satker akan mengakibatkan realisasi diknas/depag tersebut jadi minus, solusinya?

Jawaban:

- Penggunaan mata anggaran "asal tembak" sudah tentu mengakibatkan masalah pada tingkat pusat, sebagai contoh perbedaan pendapatan yang dilaporkan KPA dengan pendapatan yang diterima oleh KUN.
- Sesuai surat Direktur APK kepada Kakanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang yang tembusannya dikirimkan ke seluruh Kanwil dan KPPN, tanggal 29 Februari 2008 No.S-136/PB.7/2008, Belanja Lembaga Sosial Lainnya menggunakan kode akun 573119
- Pengembalian BOS menggunakan akun seperti pada saat BOS dibayarkan. Karena BOS dibelanjakan di Depdiknas Pusat, perlu konfirmasi ke Depdiknas apa akaun yang dipakai pada saat BOS dicairkan.
- Setoran jasa giro perbankan merupakan PNBO yang terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga menggunakan kode satker masing-masing penyeter.

22. Aris Saputro dari Kanwil Samarinda

- a. Penggunaan 814111 dan 824111, dengan adanya TSA, masihkah digunakan kode akun tersebut?
- b. Bagaimana prosedur untuk kesalahan pelimpahan pendapatan dari Bank Persepsi ke Bank Tunggal atau BI?. Contoh Bank Persepsi mitra KPPN wates salah melimpahkan pendapatan ke BI Surabaya (Rek KPPN Surabaya)?
- c. Kewenangan revisi atas SRAA berada di kantor pusat. Bagaimana apabila ada revisi setelah adanya belanja (realisasi)? Sebenarnya siapa yang berwenang atas revisi tersebut?
- d. Pada aplikasi AKLAP terdapat kekurangan yaitu: pada tampilan format Laporan Realisasi berupa kegiatan yang sama nilai pagunya ada realisasinya nihil dan di sisi lainnya pagu nihil dan nilai realisasinya ada. Kekurangan tersebut terjadi setelah melakukan update aplikasi per 17 oktober khususnya untuk kode TP (tugas pembantuan).

Jawaban:

- a. 814111 dan 824111 sudah tidak digunakan lagi dengan adanya penerapan TSA. Tahun 2009 akan diteliti kembali penggunaan kode akun.
- b. Kesalahan limpah perlu detail kasus untuk dipelajari.
- c. Domain Dit. PA
- d. Aplikasi AKLAP akan direviu kembali.

23. Srudono dari KPPN Balikpapan

- a. BAS tidak konsisten, contohnya untuk kode mata anggaran Penerimaan Jasa Perbendaharaan, di dalam daftar kode BAS tidak ada tetapi di dalam penjelasannya ada dengan

menggunakan kode 423996. Karena ketidakkonsistenan tersebut, untuk Penerimaan Jasa Perbendaharaan selama ini digunakan kode 423999.

- b. Mengapa Penyetoran denda keterlambatan yang disetor langsung ke BI (tidak melalui bank persepsi) , tidak mendapatkan kode NTPN?

Jawaban:

- a. Pendapatan jasa perbendaharaan: menggunakan kode akun baru 423251 terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2008.
- b. NTPN hanya dibukukan untuk setoran melalui bank persepsi. Kalau ada pemotongan langsung oleh bank, seharusnya diterbitkan NTPN. Bank Indonesia sampai saat ini belum termasuk dalam penerapan MPN (BI belum ikut MPN).

24. Herawaty dari Kanwil Surabaya

- a. Apa latar belakangnya UAPPAW Dekon/TP menurut PMK No. 171/PMK.05/2007 dilaksanakan oleh dinas-dinas? Sebelumnya dalam PMK No. 59/PMK.06/2005 UAPPAW Dekon/TP dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Kepala Desa. Akibatnya Kanwil Surabaya mengalami kesulitan (database dan waktu) untuk melakukan rekonsiliasi dengan 300 satker Dekon/TP, sedangkan dulu saat berlakunya PMK No. 59/PMK.06/2005 Kanwil Surabaya hanya melakukan rekonsiliasi dengan 40 UAPPAW.
- b. Bagaimana penggunaan akun untuk pengadaan aset secara swakelola?
- c. Sejauh mana peran database komda, karena saat penyusunan LKPP KPPN dan Kanwil masih harus mengirim hardcopy dan ADK lengkap?

Jawaban:

- a. Latar belakangnya adalah dalam PMK No. 171 seluruh dinas ditetapkan sebagai UAPPAW, sedangkan dalam PMK No. 59 dinas-dinas merupakan pembantu UAPPAW dan gubernur sebagai UAPPAW. Ternyata dalam proses berjalan banyak gubernur yang tidak melaksanakan hal tersebut. Maka hasil keputusan dengan Depdagri, sekarang masing-masing dinas adalah UAPPAW nya satker dekonsentrasi/tugas pembantuan sedangkan gubernur, bupati, walikota adalah koordinatornya.
- b. Belanja modal secara kontraktual maka semua belanja tersebut menggunakan mata anggaran 531111. Seperti harga pengadaan tanah, honor tim, biaya perjalanan, sertifikat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengadaan aset tersebut akan menggunakan mata anggaran 531111. Sedangkan untuk belanja modal secara swakelola, mata anggaran yang digunakan di luar dari 531111 dan dirinci dengan mata anggaran yang terpisah.
- c. Domain Dit. SP.

25. KPPN Surabaya I.

- a. Apa definisi dari bertambahnya masa manfaat?. Penjelasan BAS tidak jelas, untuk berapa tahun.
- b. Contoh pembelian accu mobil dinas, nilainya lebih dari Rp 500.000,- dengan masa manfaat 2 tahun. Mengapa masuk belanja barang bukan belanja modal?.

Jawaban:

- a. Masa manfaat aset tetap sesuai dengan umur ekonomis aset tersebut bila digunakan dalam operasional satker yang bersangkutan.
- b. Pembelian accu mobil dinas, saat kita beli mobil utuh dengan accu, saat accu soak kita beli yang baru memang menambah masa manfaat tetapi sifatnya rekondisi asset (mengembalikannya ke kondisi semula). Sehingga pembelian accu tersebut diklasifikasikan dalam belanja barang.

- 26.
- a. Mengapa "belanja upah pungut 581131" masuk kode BA 069.03 (Belanja lain-lain), bukan masuk kode BA 015.04?.
 - b. Belanja 581131 digunakan untuk belanja aset tetap, bagaimana perlakuan akuntansinya?.
 - c. Bantuan Sosial bisa dilakukan secara LS ke rekanan, bagaimana dengan potongan pajaknya?.
 - d. Apa kriteria BLU bertahap dan BLU penuh?.

Jawaban:

- a. Disepakati, ke depan belanja upah pungut PBB dialokasikan pada BA 015.03 bukan BA 069.03 lagi. Untuk saat ini sedang direformasi, upah pungut diusahakan tidak ada lagi.
- b. Belanja lain-lain-Upah pungut PBB, memang benar ada yang digunakan untuk membeli aset tetap. Aset tetap tersebut dicatat sebagai aset tetap BAPP sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk selanjutnya aset tetap tersebut diserahterimakan kepada BA pelaksananya.
- c. Sepengetahuan kami untuk dana bantuan tidak dikenakan pajak. Namun demikian karena hal tersebut bukan kewenangan dari Akuntansi, perlu dilihat lagi peraturan perpajakan dan perbendaharaannya.
- d. 1. BLU bertahap diberikan kepada satker yang menerapkan sebagian fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU. Fleksibilitas terbatas pada hal-hal pokok yang diperlukan dalam pemeberian pelayanan, misalnya jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan aset, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. Fleksibilitas tidak diberikan dalam hal: penggunaan langsung PNPB secara penuh, pengelolaan investasi, pengelolaan utang, pengadaan barang/jasa.
- 2. BLU penuh diberikan kepada satker yang menerapkan seluruh fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU.

Syarat teknis untuk pengajuan satker menjadi BLU :

1. menyampaikan RBA.
2. menyampaikan proposal.

27. Prihono dari KPPN Sragen:

- a. Biasanya penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun, bagaimana kalau diusulkan agar setiap satker dipaksa untuk mencairkan dana secara bertahap misalnya april atau juni?.
- b. Perubahan sistem akuntansi dari kas basis ke akrual basis. Sejauhmana akibat dari perubahan tersebut terhadap pekerjaan KPPN?. Kalau bisa diinformasikan terlebih dahulu langkah-langkah perubahan tersebut ke KPPN atau user.

Jawaban:

- a. Kemampuan masing-masing satker tentang forecast penerimaan, belanja dan realisasinya tidak konsisten (jauh dari yang dibayangkan). Contoh ketersediaan anggaran baru ada bulan maret. Ke depan kita akan melihat rencana penarikan dana dan rencana penyediaan dana (cash forecast dari satuan verja). KPPN sendiri belum membuat rencana for casting dan manajemen kas (cash forecast kppn). Jadi satker harus dipaksa dan diyakinkan bisa. Sehingga akhir-akhir tahun realisasinya bisa mencapai 60%.
- b. Sangat besar pengaruhnya, dan berakibat terhadap pekerjaan kantor tetapi tidak dimulai di tahun 2009. Ke depan, akan disiapkan semua peraturan dan kebutuhan terkait dengan konversi dari *cash toward accrual basis* ke *accrual basis*. Semua akan diujicoba secara bertahap, pada saat pengembangan aplikasi.

28 Kanwil Surabaya. (aklap.surabaya@perbendaharaan.go.id atau aklap.surabaya@gmail.com).

- a. Belum tersedia akun untuk pengeluaran setelah perolehan (belanja modal) untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara swakelola (sebagaimana pengeluaran untuk perolehan awal yang dibedakan akunnya untuk yang dirinci secara swakelola)? Akun 535111 digunakan untuk pengeluaran setelah perolehan (belanja modal) yang dikerjakan secara kontraktual.
- b. Setelah TSA, apakah masih diperkenankan menggunakan akun 824111. Pada KPPN Jember terdapat kasus salah limpah pembagian PBB untuk Pusat (10%) yang dilimpahkan dari Bank Jatim Lumajang (BO III PBB KPPN Jember) ke BI Jember seharusnya dilimpahkan ke BI Surabaya. Atas kesalahan tersebut setelah dilakukan konfirmasi oleh KPPN Surabaya yang menerima salah limpah maka KPPN Jember membukukan akun 824111 (pengeluaran kiriman uang dari KPPN non induk ke KPPN Induk).
- c. Pendapatan denda dalam BAS dikelompokkan dalam kelompok akun 42375, dimana masih belum tersedia akun untuk

menampung penerimaan denda atas keterlambatan pelimpahan pajak oleh Bank persepsi mitra kerja KPPN. Selama ini bank dan KPPN membukukan tidak seragam yaitu dibukukann dalam pendapatan anggaran lain-lain (akun 423999), pendapatan denda pelaksanaan rekening pengeluaran KPPN bersaldo nihil dalam penerapan TSA (akun 423756).

- d. Terdapat perbedaan dalam pembentukan untuk koordinator UAPPAW untuk satker yang jenis kewenangannya tugas pembantuan antara peraturan dalam PMK 171 sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah dengan PP 8/2006 pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yaitu: pada PMK 171 yang ditunjuk sebagai koordinator (UAPPA-W) adalah salah satu dinas pada satker Tugas Pembantuan sedangkan pada PP 8/2006 adalah bagian keuangan pada pemerintah daerah.

Jawaban:

- a. Tetap mengikuti akun Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi menurut aset tetapnya.
- b. Seharusnya setelah TSA, akun tersebut tidak dipakai lagi. Namun demikian untuk kasus ini, akun tersebut dipakai sebagai sarana *troubleshooting* sementara.
- c. Untuk akun tersebut memang belum ada akunnya tersendiri, masukan bagus untuk menambah akun tersebut (updating BAS).
- d. PMK 171 pada prinsipnya mengamanatkan Kepala Daerah untuk menunjuk UAPPA-W sendiri.

29 KPPN Mamuju

DIPA dialokasikan untuk akun belanja jasa profesi.

Apakah akun belanja profesi dapat digunakan membayar biaya honor kegiatan, biaya perjalanan dan biaya panitia kegiatan.

Jawab :

Tidak boleh.

30 Bagaimana perlakuan untuk dana bergulir di tahun 2008 dan 2009. Contoh LUEP.

Jawaban:

Dana bergulir tidak ada dalam PP 21.

Jenis-jenis dana bergulir :

- a. bantuan dana bergulir → bantuan sosial PNPM.
- b. subsidi bunga, premi asuransi dan lain-lain.
- c. bantuan barang/jasa seperti pelatihan KUKM → belanja barang dan jasa.
- d. penyediaan dana bergulir → belanja modal fisik lainnya (lalu dialihkan jadi BLU).
- e. Pinjaman jangka pendek (bayar kembali, setor ke Kas Negara. LUEP)→ perlu dialihkan ke BLU –dana bergulir (tidak perlu setor ke kas negara).
- f. Pendanaan jangka panjang → pembiayaan pada APBN.

Untuk tahun 2009; LUEP→ dikelola dalam kerangka BLU

31 KPPN Kupang

Satuan kerja RSUD Kupang pada akhir tahun 2008 masih ada sisa UP, sedangkan pada tahun 2009 satuan kerja tersebut tidak menerima dana dari APBN lagi. Bagaimana perlakuan sisa UP tersebut ?

Jawaban:

Sisa tersebut harus diminta kembali, karena tidak mungkin dibebankan 2008 karena DIPA satuan kerja sudah tidak ada lagi. Akan berpengaruh pada laporan keuangan atau neraca baik tingkat satker atau tingkat KPPN.

Karwas tetap dibuka kalo ada sisa UP. Dan apabila ada setoran tahun berikutnya baru karwas dinihilkan.

Tambahan pak alwi (Programmer Dit. SP) : pada saat dilakukan inventarisasi kode satuan kerja dimungkinkan pada tahun yang berbeda kode satuan kerja yg sama digunakan untuk uraian satuan kerja berbeda.

Contoh tahun 2007—112233 digunakan untuk satker abc

2008—112233 digunakan untuk satker def.

32 Pak Ece

Apa kiat-kiat agar LKPP KPPN akurat, akuntabel dan transparan.

Jawab :

Agar LKPP lebih akurat :

- Intinya harus perbaikan data.
- Rekonsiliasi data
- Konsolidasi data
- Konfirmasi berdasarkan
- Nilai posisi kas sama dengan saldo pada salinan rekening Koran
- Analisa data kiriman uang dan pemindahbukuan antar rekening

33 Apakah tepat belanja untuk penambahan daya listrik menggunakan kode akun 521219 ?

Jawab :

Penambahan daya listrik tersebut jelas menambah kapasitas dan bila nilainya melebihi batas nilai kapitalisasi seharusnya dialokasikan dalam belanja modal. Dapat dialokasikan pada belanja modal peralatan dan mesin atau belanja modal jaringan, tergantung kepada judgement awal pencatatan daya listrik tersebut. Namun demikian bila tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi maka pada saat perencanaan dialokasikan ke belanja barang non operasional lainnya.

34 Bambang

- Penyusunan LKPP KPPN pada saat ini, masih terkendala dengan

adanya sisa UP yang belum terselesaikan.

- Apakah Sisa UP pada Neraca dapat dikoreksi dengan jurnal aset.
- KPPN sudah melaksanakan rekonsiliasi harian bendum, perbendaharaan dan vera. Mohon dibuat aturan berupa surat edaran atau peraturan dirjen terkait hal tersebut.

Pada menu rekonsiliasi, agar dihilangkan cetak data yang sama.

Jawab :

- KPPN dan Kanwil agar mengarahkan satuan kerja menggunakan kode akun yang ditetapkan peruntukannya (PNBP atau Pengembalian UP) sehingga kas di bendaharawan tidak minus.
- Proses jurnal aset boleh dilakukan dengan memperhatikan karwas dan data transaksi satuan kerja yang bersangkutan.
- Untuk 2006 dan 2007 belum menyajikan laporan komparatif. Seharusnya mulai tahun 2008, ada laporan komparatif berdasarkan input data aset tetap per satuan kerja. Prosedur rekonsiliasi data neraca antara KPPN, KPKNL dan satuan kerja mulai diterapkan pada tahun 2008 dan 2009.
- Rekonsiliasi harian internal, akan dibahas di Jakarta. Rekonsiliasi internal LKP dengan Vera terdapat pada perdirjen 65.
- Untuk satuan kerja dengan beberapa KPPN pembayar, satuan kerja melakukan rekonsiliasi dengan masing-masing KPPN pembayar sesuai dengan jumlah dalam DIPA.
- Satuan kerja jangan memecah data, harus satu laporan. Yang dilihat adalah tanggung jawab KPPN setempat.
- DIPA dengan beberapa KPPN, biasanya terjadi pada saat penyusunan RKA-KL.

35 Apa dasar hukum yang digunakan untuk penentuan kode BA BUN (999)

Jawaban:

Dasar hukum Penetapan BA BUN

- PMK 171/PMK.05/2007 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- PMK tentang Penetapan Bagian Anggaran.
- Surat DJA tentang Penetapan Eselon I tanggal 8 September 2008 Nomor S-290/AG.2/2008 tentang permintaan Kode Bagian Anggaran terkait PMK. 171/PMK.05/2007.
- Surat DJA tentang Penetapan KPPN sebagai Satuan Kerja Bendahara Umum Negara.
- Dua surat terdahulu tersebut akan dibuatkan surat Direktur APK ke seluruh KPPN.

36 Ada penerimaan yang berasal dari pertambangan, PBB Migas yang ditransfer dari rekanan ke Bank Indonesia.

KPPN mendapatkan surat dari Direktorat PKN yang memberikan informasi ada perbedaan pencatatan pendapatan yang terjadi karena ada transfer langsung ke Bank Indonesia? Transaksi tersebut tidak

ada nomor NTPN.

Jawaban:

Penerimaan negara → sepanjang melalui bank persepsi dibukukan dengan MPN, sedangkan penerimaan kas negara yang langsung diterima Bank Indonesia tidak termasuk dalam mekanisme MPN.

37 Sutartono KPPN Gorontalo

- Belanja modal jaringan (internet, ac, telepon) satu paket dengan pengadaan gedung baru dibukukan sebagai aset gedung dan bangunan. Apabila ada pengadaan jaringan baru (penambahan jaringan), dibukukan sebagai aset jaringan atau menambah nilai aset gedung dan bangunan ?
- KPPN mendapatkan SKPA dari KPPN Bogor. Pada SKPA tersebut hanya ada 1 mata anggaran dan digunakan untuk belanja honor, sewa, konsumsi dan perjalanan peserta. Saat dicairkan ditolak oleh KPPN, dan disarankan merevisi DIPA tersebut di kanwil gorontalo.
- Ada satu satuan kerja pembangkit listrik, di lebih dari satu lokasi dengan beberapa KPPN Pembayar.
- Bagaimana cara rekonsiliasi antara satuan kerja dan KPPN, karena jumlah DIPA satuan kerja berbeda dengan jumlah DIPA KPPN ?
- Bagan Akun Standar yang baru sudah mengadopsi konsep full costing, apakah berpengaruh pada aplikasi SPM dan SP2D

Jawaban:

Masalah jaringan : pada saat gedung dibangun ada paket jaringan maka dibukukan sebagai gedung dan bangunan, sedangkan untuk penambahan jaringan listrik dan telepon, internet, dan ac dibukukan sebagai belanja modal jaringan tidak lagi dialokasikan dalam belanja modal gedung dan bangunan.

Masalah SKPA:

Tidak sesuai dengan konsep anggaran berbasis kinerja.

Anggaran dibuat di Pusat kemudian dicairkan di daerah, maka yang kinerjanya baik adalah pusat.

Rekomendasi BPK, SKPA 2007 harus dikaji ulang.

SKPA satu ma 521119, lengkap konsumsi, honor, perjalanan boleh dibayarkan sepanjang menyangkut satu jenis kegiatan yang sama (paket). Saran narasumber : tahun berikutnya SKPA diperlakukan sebagai, SKU.

Satu satuan kerja dengan banyak KPPN bayar.

Rekonsiliasi sulit dilakukan per KPPN, terhadap DIPA seperti ini :

1. Revisi DIPA untuk kode satuan bayar.
2. Rekonsiliasi hanya dilakukan terhadap pagu dan realisasi pada KPPN bayar setempat. Satuan kerja tetap mengimput semua data pagu di KPPN pembayar.

Saat penyusunan RKA-KL, untuk kegiatan yang sama tidak bisa masuk dengan kode KPPN yang sama seharusnya dibedakan pengisian kode lokasi.

- 38 Ece
Tolong dijelaskan konsep pro poor, pro job, dan pro growth
Jawaban:
APBN harus menjadi alat pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, memperluas lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
- 39 Kanwil Makassar
Sesuai dengan peraturan yang baru terbit, PPH Final Jasa Konstruksi dibukukan menggunakan kode akun 411128, bagaimana perlakuan untuk pendapatan PPH Final Jasa Konstruksi yang selama ini terlanjur dibukukan dengan kode akun 411124?,
Bagaimana caranya memperbaiki LKPP yang terlanjur diterbitkan?
Jawaban:
PPH atas jasa konstruksi dibukukan pada akun 411128, seharusnya KPPN Makassar melakukan koreksi pada saat ditemukan kesalahan pencatatan 412124 yg seharusnya 412128, dengan mengacu pada pedoman koreksi yang diatur dengan perdirjen No Per-69/PB/2006 tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan.
- 40 Revisi susah dilakukan sudah akhir tahun.
Belanja yang sudah direalisasikan → dikembalikan belanja yang sudah dikeluarkan. Pengembalian belanja sampai saat ini, tidak menambah alokasi Dana atau DIPA.
Jawaban:
Perlu peraturan perbendaharaan bahwa setoran pengembalian belanja dapat menambah sisa dana, dan hal tersebut bukan kewenangan akuntansi.
- 41 I Wayan Pinia, kanwil Denpasar.
Pada PMK 171 sebagai pengganti PMK 59, disebutkan bahwa uappaw dekon TP dibentuk oleh masing-masing dinas. Gubernur/Bupati sebagai Koordinator UAPPAW Dekon TP.
Rekonsiliasi tingkat wilayah belum dilaksanakan.
Minta payung hukum agar rekonsiliasi bisa terlaksana
Jawaban:
Sesuai dengan PMK No 59 dan SE Ditjen No 96, masing-masing dinas berfungsi sebagai sub uaw, sedangkan gubernur dan bupati sebagai Unit Akuntansi Wilayah. Karena ketentuan ini tidak berjalan maka di PMK 171 diadakan perubahan. Masing-masing dinas menjadi uappaw dan diwajibkan melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen PBN setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sedangkan Gubernur dan Bupati adalah koordinator UAPPAW, hanya bertugas menyusun laporan keuangan gabungan dinas-dinas dan mengirimkan salinannya ke Kanwil Ditjen PBN. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas LKPP yang dihasilkan.

- 42 KPU membeli mobil atau kendaraan dinas menggunakan akun 581, apakah diinput di Neraca Pemilu 5 tahun sekali, apakah barang diserahkan ke pemda atau tidak
Jawaban:
Tetap dicatat di neraca KPU pusat.
Sampai saat ini, KPUD tidak jelas status satuan kerjanya.
- 43 Kasus pengiriman uang :
Kesalahan kode pelimpahan oleh Bank persepsi, seharusnya dilimpahkan ke Bank Indonesia, terlimpah ke Bank Indonesia Manado.
Sudah ada jawaban dari Dit APK. Tetapi KPPN Manado tidak bersedia mengikuti prosedur dalam surat dimaksud.
Ada usulan dari kendari untuk menggunakan mekanisme SPT (surat perintah transfer) yg dibuat Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
Jawaban:
Kasus akan dipelajari, termasuk cara penyelesaiannya. Sebaiknya KPPN melaksanakan instruksi dit APK tersebut.
Penggunaan akun kiriman uang harus hati-hati.
Pada LKPP tahun 2007, terdapat selisih kiriman uang 5 trilyun yang belum terselesaikan.
- 44 Ada inkosistensi dalam BAS
Antara pengeluaran pemindahbukuan tidak sama dengan penerimaan pemindahbukuan pada akun 824124 dan 814124
Menurut BAS
814124 : Penerimaan kiriman uang dari BO I KPPN Non KCBI ke Rekening 501. 000.000 KPPN Induk.
824124 : Pengeluaran kiriman uang dari Rekening 501.000000 KPPN Induk ke BO I KPPN Non KCBI.
Jawaban:
Sedang menyiapkan perdirjennya untuk perbaikan kodefikasi dan uraian akun dalam BAS.
- 45 Bendahara satuan kerja Dinas Kehutanan menerima pendapatan dari proses lelang. Menurut KPKNL pendapatan tersebut disetorkan oleh dinas yang bersangkutan.
Seharusnya PNBP yang berasal dari proses lelang disetor oleh siapa ? dan menjadi pendapatan BA berapa ?
Jawaban:
Bea lelang : menjadi hak departemen keuangan
Hasil penjualan aset tetap : dibukukan sebagai PNBP kementerian negara/lembaga
- 46 Pada aplikasi SP2D, begitu SPM diterima di front office, langsung membebani anggaran, kesulitan di middle office.

Pada menu cetak Karwas tidak sama antara jumlah sub total BKPK berbeda dengan rincian

Jawaban:

KPPN percontohan :

Penyusunan aplikasi SP2D, belum berubah secara total.

Hanya memindahkan beberapa menu dari middle ke front office.

Dari sisi middle, boleh hapuskan data SPM tersebut apabila salah.

SPM yang masuk sudah dibebankan agar dapat dijadikan acuan sebagai dasar pemrosesan data SPM berikutnya.

47 Wirdawati –KPPN Pematang Siantar

Tanya:

Bagaimana solusinya agar KPPN nilainya (rangking) meningkat dalam hal penyampaian Laporan Keuangan tingkat KPPN?

Jawaban:

Beberapa faktor penentu adalah:

1. Ketepatan dan keakuratan penyampaian data;
2. Seluruh data harus sudah direkon dengan Bank atau rekening koran. Setidaknya posisi angka harus sama;
3. Untuk Laporan Arus Kas, mempunyai ketentuan tertentu yaitu:
 - beban kerja yang menimbulkan keterlambatan;
 - Seksi verak tidak ada kewenangan dalam melakukan perubahan data.

LKP sama dengan LAK, secara total sama tetapi rinciannya berbeda menjadi perhatian untuk transaksi non anggaran.

48 Eddy Fadilah – KPPN Prima Jambi

Tanya:

1. UAPPAW wajib menyampaikan laporan keuangan per bulan ke Kanwil DJPBN dalam rangka rekonsiliasi. Jenis sanksi seperti apa kalau UAPPAW tidak menyampaikan laporan keuangan yang dimaksud?
2. Masing-masing dinas DKTP setiap bulan melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN, Mohon penjelasannya!
3. Terkait rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN, satker TP yang berlokasi di luar ibukota propinsi mengalami kesulitan terutama biaya perjalanan. Bolehkah biaya perjalanan untuk rekonsiliasi dimasukkan ke dalam RKAKL?
4. Apakah setiap dinas DKTP dapat membentuk UAPPAW dalam 1 bagian anggaran yang sama?

Jawaban:

1. Menurut PMK no. 171 thn 2008, perdirjen PBN no. 22 thn 2008, dan perdirjen PBN no. 19 thn 2008 rekonsiliasi dan penyampaian laporan kepada Kanwil DJPBN yang sebenarnya adalah triwulanan. PMK no. 171 thn 2008 sedang kami revisi. Sanksi diatur sendiri oleh Kanwil DJPBN, contoh: Penundaan penerbitan dispensasi UP dan TUP, Penundaan penerbitan SP2D kepada

Satker terkait, Penundaan revisi DIPA. Pengenaan sanksi kepada UAPPAW dan satker tertentu yang bermasalah dimulai sejak terbitnya Perdirjen PBN no. 19 thn 2008.

2. Hal tersebut merupakan domain dari penganggaran.
3. Ketentuannya 1 UAPPAW = 1 Dinas = 1 Bagian Anggaran = 1 kode satker. Pada prinsipnya kode dinas DK/TP berbeda. UAPPAW untuk dinas DK/TP bisa menerima beberapa BA. Di aplikasi DK/TP wajib mengisi kode dinas yang disepakati Kanwil DJPBN dengan gubernur. Pada saat rekonsiliasi, bisa ditampilkan juga format per BA dan per dinas.

49 Faturrohman – Kanwil DJPBN Aceh

Tanya:

1. Pada saat rekonsiliasi tingkat UAPPAW, terdapat transaksi BKKBN yang membebani rekening khusus, yaitu adanya SPM Pengganti. Setelah dikonfirmasi ke KPPN, ternyata yang digunakan adalah BA ES satker yang merealisasikan dengan mata anggaran non anggaran. Bagaimana perlakuan atas transaksi tersebut?
2. Ada penggabungan satker, ternyata elemen data DIPA yang direvisi adalah nilai pagu total bukan sisa dana yang belum terealisasi, apakah realisasi harus direvisi sesuai DIPA Baru?. Kode satker menggunakan kode lama, sedangkan uraian satuan kerja menggunakan uraian baru (seolah-olah satker tersebut ada dari awal).
3. Dana DK/TP dibedakan berdasarkan identifikasi kode satker dan nomor urut dinas. Ada satker pelaksana SKEPADA yang menggunakan kode kewenangan KP (Kantor Pusat). Setelah proses revisi oleh DJA → terjadi laporan keuangan minus.

Jawaban:

1. Masalah reksus dibuat oleh KPPN jika transaksi tersebut membebani reksus secara langsung. Laporan Realisasi belanja tetap dilaporkan SAI. SPM penggantian tersebut termasuk non anggaran untuk mencatat transaksi pengiriman uang. Mestinya kode satker yang digunakan adalah kode BABUN, eselon I BUN, dan kode satker BUN. Masalah penggabungan kode satker, menyebabkan laporan realisasi anggaran minus. Termasuk revisi SRAA dan Pusat.
2. Sedang disiapkan surat edaran tentang perlakuan transaksi atas kasus Departemen Pertanian (penggabungan satker) dan terhadap revisi yang menyebabkan laporan realisasinya minus. Satker A dan satker B bubar, menjadi satker c. Satker A dan satker B bubar, berubah menjadi satker A" dengan uraian baru. Jika terjadi penggabungan satker, seharusnya yang direvisi adalah sisa anggaran yang tidak/belum terealisasi.
3. Sudah ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2008 tentang pengelolaan dana DK/TP.

50 Kanwil III Padang
Transaksi dari BLU, kejadian di KPPN Padang, yang tidak bisa diposting di seksi vera KPPN berkenaan, sedangkan di KPPN bukit Tinggi bisa diposting.

Jawaban:

SP2D yang terbit 2008, dengan tahun anggaran 2007, tidak akan diposting. BAS ada dua kemungkinan BAS belum diupdate atau kode akun tidak dikenal serta kemungkinan versi Aplikasi Vera yang tidak sama.

51 Mulyanto – KPPN Bukit Tinggi

Usulan:

Mengenai akun, kalau bisa untuk akun-akun yang berpotensi menimbulkan persepsi lain supaya dibuatkan atau dijelaskan maksud dan makna akun-akun tersebut. Kemudian diedarkan ke seluruh KPPN.

Jawab :

Terima kasih, usulan bagus.